PENYALAHGUANAAN PRAKTIK HAWALA (MEMINDAHKAN) UNTUK PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Rahmat Abdillah Alfiandie, Sudarto, Bambang Widarto
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Abstract

The hawala system does not use an international transfer recording system that employs SWIFT codes like the official remittance system. As a result, funds transferred using the alternative remittance system remain unmonitored and untraceable. Therefore, it is interesting and important to examine how the misuse of hawala practices for terrorism financing occurs based on Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. Is the misuse of hawala practices for terrorism financing prevalent in Indonesia? The research method used is normative legal research with an approach based on legislation and conceptual analysis. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and analyzed using qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that hawala practices, as one form or typology of terrorism financing, constitute a criminal offense as stipulated in Law No. 9 of 2013. Indonesia's efforts to combat the misuse of hawala practices involve a combination of hard and soft approaches. The hard approach involves establishing regulations related to hawala misuse in terrorist financing, such as Law No. 9 of 2013 and Law No. 3 of 2011. Meanwhile, the soft approach is implemented through the National Counterterrorism Agency (BNPT) by providing deradicalization programs for convicted terrorists to offer counter-narratives.

Keywords: Law No. 9 of 2013, Hawala, Criminal Offense, Terrorism Financing.

Abstrak

Sistem hawala tidak menggunakan sistem pencatatan transfer internasional yang menggunakan kode SWIFT seperti pada sistem remitansi resmi, sehingga otomatis pengiriman dana yang menggunakan sistem alternative remittance system menjadi tidak terpantau dan tidak terlacak. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji bagaimana bentuk penyalahgunaan praktik hawala untuk pendanaan terorisme berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme? Dan apakah bentuk penyalahgunaan praktik hawala untuk pendanaan terorisme banyak terjadi di Indonesia? Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa praktik hawala sebagai salah satu bentuk atau tipologi pendanaan terorisme menjadikan sebagai bentuk tindak pidana pendanaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2013. Dan upaya penanggulangan penyalahgunaan praktik hawala oleh Indonesia adalah dengan mengkombinasikan secara hard approach dan soft approach. Secara hard approach dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik penyalahgunaan hawala dalam pendanaan teroris yakni UU No. 9 Tahun 2013 dan UU No. 3 Tahun 2011. Sedangkan secara soft approach dilakukan melalui BNPT melalui program deradikalisasi bagi narapidana teroris untuk memberikan counter-narratives.

Kata kunci: UU No. 9 Tahun 2013, Hawala, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pendanaan

PENDAHULUAN

Pergerakan terorisme yang terus-menerus meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Perkembangan ini tentunya selalu didukung oleh aspek pendanaan yang sukses

sehingga organisasi teroris dapat bertahan hingga saat ini. Evolusi yang terjadi dalam tubuh organisasi teroris tidak menghalangi organisasi tersebut dalam mengatur keuangan untuk berbagai perencanaan, pelatihan, hingga eksekusi serangan. Bukti nyata pentingnya aspek pendanaan terlihat dalam serangan terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon di New York. Adapun serangan tersebut merupakan bagian dari strategi jejaring teroris global yaitu Al Qaeda. Eksekusi serangan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) pesawat komersial pada saat bersamaan. Sesaat setelah serangan, Presiden AS George Bush menjadikan momentum tersebut sebagai dimulainya Global War on Terrorism (GWOT). Dua pesawat yang ditabrakkan ke World Trade Center menjatuhkan korban tewas 2000 orang lebih, sedang satu pesawat jatuh di sekitar Pennsylvania. Diduga sasarannya adalah Gedung Putih, kediaman resmi Presiden AS. Setelah serangan 11 September, Al Qaeda maupun kelompok-kelompok sempalannya dan sel-sel yang berafiliasi pada mereka, menjadikannya cetak biru pola penyerangan mereka. Operasi serangan pada tanggal 11 September 2001, melewati proses pemilihan pelaku pengeboman, perencanaan pendanaan, persiapan strategi serangan hingga pelaksanaan serangan.

Khalid Sheikh Muhammad yang merupakan dalang dari operasi serangan memanfaatkan 4 (empat) orang jihadis di Kandahar dari Jerman yang dengan sukarela menawarkan diri. Dikenal sebagai kelompok Hamburg, mereka memiliki kelebihan karena mudah beradaptasi dengan lingkungan Barat karena sudah lama tinggal di lingkungan orang Barat dan mahir berbahasa Inggris. Tak heran jika akhirnya, Mohamed Atta, Ramzi Binalshibh, Marwan al Shehhi dan Ziad Jarrah menjadi pemain kunci dalam serangan 11 September tersebut. Poin penting yang menjadi kunci keberhasilan dalam operasi tersebut adalah dari segi pendanaan. Operasi serangan 11 September 2001 menghabiskan dana sekitar \$ 400.000 - \$ 500.000 untuk merencanakan dan menjalankan serangan mereka. Bukti yang tersedia mengindikasikan bahwa 19 pelaksana aksi dibiayai oleh Al Qaeda, baik melalui transfer maupun secara tunai yang disediakan oleh Khalid Sheikh Muhammad melalui pembawaan secara langsung ke AS atau didepositkan di rekening bank asing dimana dapat diakses di Amerika Serikat.

Teroris menyadari benar bahwa uang adalah mesin penggerak seluruh kegiatan kelompok teroris. Darah dari kegiatan teroris adalah uang dan tanpa uang teroris tidak dapat berbuat hal yang signifikan. Steve Kiser mengatakan bahwa aliran dana bagi teroris bermanfaat untuk keberlangsungan hidup organisasi teror tersebut serta dalam rangka pembiayaan operasional yang meliputi segala biaya menyangkut operasi teror yang akan dijalankan. Segala cara dan pemanfaatan infrastruktur sektor keuangan baik perbankan maupun non perbankan adalah jalan untuk mendapatkan dana bagi kegiatan teroris.

Di tahun 2003, Dr. Zachary Abuza, seorang profesor Politik Internasional dari Simmons College telah meneliti bahwa berbagai metode telah dilakukan oleh Al Qaeda untuk mendapatkan uang dalam rangka pendanaan kegiatan teroris mereka. Al Qaeda membangun jaringan hingga ke wilayah Asia Tenggara sebab kawasan ini merupakan kawasan strategis bagi pergerakan dan pendanaan. Al Qaeda mengkooptasi wilayah Asia Tenggara karena ingin menjadikan gerakan di wilayah lokal ini sebagai bagian dari jaringan gerakan jihad secara global. Jemaah Islamiyah (JI) merupakan salah satu sel lokal yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dana bagi kegiatan teroris. Pendanaan kegiatan teror di wilayah Asia Tenggara, dalam hal ini dilaksanakan oleh Jemaah Islamiyah. Sehingga dapat dilihat bahwa Jemaah Islamiyah merupakan bagian integral dari Jaringan Al Qaeda. Pendanaan yang dilakukan biasanya melalui organisasi Islam yang

menyalurkan amal (asosiasinya berasal dari Saudi Arabia) serta melalui perusahaan-perusahaan yang mengusahakan dana dan memindahkan dana ke seluruh wilayah. Modus pendanaan yang dilakukan jaringan adalah penggunaan sistem hawala.

Kata hawala ini berasal dari bahasa Arab, yang bermakna “mengalihkan” atau “memindahkan”. Hawala adalah sistem transfer uang secara informal, didasarkan pada asas kepercayaan yang dilakukan oleh jaringan luas pedagang uang yang biasanya ada di Timur Tengah, Afrika Utara dan Timur Laut, serta Asia Tenggara. Transaksi hawala ini, misalnya bila A di Suriah ingin mengirimkan uang kepada B di Indonesia, A tinggal menyetorkan uang kepada hawala dealer di Suriah. Kemudian B akan mencairkan uang itu lewat dealer rekanan di Indonesia.

Jasa penyelenggara pengiriman uang semakin marak digunakan. Hal ini terlihat dari jumlah remitansi dana yang semakin meningkat, khususnya dari sektor tenaga kerja Indonesia (TKI) dimana pada tahun 2011 saja telah tercatat Rp 28 milyar lebih dana masuk ke Indonesia melalui jalur remitansi. Jasa pengiriman uang ini menjadi rentan ketika tidak semua dana dikirimkan melalui jalur resmi (baik itu via bank maupun non-bank), misalnya apabila dana dikirimkan melalui sistem remitansi alternatif (alternative remittance system/ARS) seperti hawala. Sistem hawala tidak menggunakan sistem pencatatan transfer internasional yang menggunakan kode SWIFT seperti pada sistem remitansi resmi (misalnya, Western Union, MoneyGram, PT. POS, dan lain-lain), sehingga otomatis pengiriman dana yang menggunakan sistem alternative remittance system menjadi tidak terpantau dan tidak terlacak.

Sistem hawala ini juga pernah digunakan kelompok teroris Jemaah Islamiyah pada kasus Bom Bali 2002 dan Bom Marriot tahun 2003. Ketika itu, dana sebesar US\$30 ribu dan 200 ribu baht yang diperoleh oleh Hambali dari al-Qaeda dipindahkan dari Pakistan ke Bangkok, Thailand melalui mekanisme hawala tersebut. Kemudahan yang ditawarkan jasa ini serta minimnya pengawasan dari pemerintah menjadikan sektor remitansi dana sangat mungkin digunakan teroris untuk mengirimkan dan atau menerima uang melalui mekanisme ini. Meski saat ini pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Transfer Dana melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang prosedur pelaporan transfer dana dari luar negeri ke Indonesia dan juga sebaliknya.

Selain itu, trend transfer dana dari luar negeri ke Indonesia mayoritas dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil. Sehingga, meskipun nantinya ada kewajiban pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, namun upaya untuk mendeteksi, mencegah, dan melacak dana-dana yang dikirim oleh kelompok teroris akan tetap sulit apabila dilakukan dalam jumlah yang terbatas/kecil.

Terkait dengan isu pendanaan terorisme, maka beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi dari tipologi pendanaan melalui remitansi dana ini diantaranya adalah:

- a. Besarnya jumlah dana yang dikirimkan melalui sistem remitansi dana.
- b. Nilai rata-rata transaksi remitansi dana tergolong kecil, yakni berkisar 5-8 juta rupiah. Hal ini tentu akan sulit diawasi dan dipantau oleh lembaga pengawas.
- c. Belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang di Indonesia.
- d. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih lanjut mengenai sistem remitansi dana alternatif seperti hawala, sehingga aktivitas pengiriman dana melalui jalur tersebut belum dapat diawasi oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual,. Berdasarkan jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan factor yang sangat penting, karena sumber data yang menyangkunt kuatlitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan,

Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Praktik *Hawala* Untuk Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Perspektif Terhadap Pemakaian Sistem *Hawala*

Ada 2 (dua) perspektif mengenai hawala dilihat dari tujuan penggunaan hawala itu sendiri yaitu hawala tujuan positif dan hawala tujuan negatif.

a. Hawala Tujuan Positif

Pada dasarnya hawala tidak jauh berbeda dengan layanan pengiriman yang ditawarkan oleh bank formal atau penyedia layanan transfer seperti Western Union atau Money Gram. Namun, ciri khas hawala yang berada pada ruang lingkup pengoperasian, biaya yang dikenakan, anonimitas, aksesibilitas, kepercayaan, budaya dan kecepatan transfer itu sendiri. Dimana ciri khas tersebut sangat menguntungkan bagi orang-orang khususnya imigran yang ingin mengirimkan uang atau melakukan suatu pembayaran. Jadi, hawala membantu imigran mengirim uang jauh lebih mudah daripada menggunakan sektor formal.

Ciri khas hawala dalam lingkup pengoperasian, hawala dapat mengirim uang ke daerah-daerah terpencil sekalipun yang dimana tidak tersentuh oleh sektor formal (sektor formal tidak memiliki cabang di daerah tersebut).

Hawala dengan tujuan positif juga memiliki dampak ekonomi yang positif khususnya untuk negara-negara berkembang meskipun dampak negatif juga ada.

1) Dampak Positif di Bidang Ekonomi

Pengiriman uang oleh imigran merupakan sumber penting untuk pendapatan negara khususnya di negara-negara berkembang. Pada tahun 2005, World Bank memperkirakan pengiriman uang untuk pengembangan negara dari pekerja di luar negeri sebesar USD 126 milyar pada tahun 2004, dimana jumlah itu 2 (dua) kali lipat dari jumlah Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance) yang diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pengiriman uang baik itu dari sektor formal maupun informal seperti hawala sangat penting bagi perekonomian nasional dan rumah tangga yang merupakan sarana untuk keluar dari kemiskinan. United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2005 mengeksplorasi potensi peranan dari pengiriman uang untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) yaitu tujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan ternyata pengiriman uang ke negara-negara berkembang dapat memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

2) Dampak Negatif di Bidang Ekonomi

Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu adanya dampak potensial terhadap rekening moneter negara-negara yang melakukan transaksi melalui hawala. Hawala merupakan sistem yang tidak terdaftar secara resmi sehingga akibatnya pengiriman dana dari satu negara ke negara lain tidak tercatat sebagai peningkatan aset luar negeri negara penerima berbeda dengan pengiriman di sektor formal yang sudah pasti tercatat. Dengan demikian transaksi melalui hawala dapat mempengaruhi jumlah dan nilai uang yang beredar di negara penerima atau bisa dikatakan transaksi melalui hawala cenderung meningkatkan jumlah dan nilai uang yang beredar di suatu negara tanpa disadari oleh pemerintah.

Selain dampak di atas, hawala juga memiliki dampak fiskal bagi negara pengirim dan penerima karena tidak adanya pajak yang dibayar saat melakukan transaksi hawala karena tidak adanya pajak/bea yang dibayar pada transaksi hawala maka pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari

pajak, kehilangan pendapatan nasional yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.

Dampak penyalahgunaan hawala terhadap keuangan internasional yaitu dampak pada regulasi keuangan dan kebijakan moneter. Pada prinsipnya, sistem pengiriman uang informal cenderung mengurangi efektivitas instrumen tradisional kebijakan moneter dalam membuatnya lebih sulit untuk menilai kebutuhan untuk keseimbangan uang dalam perekonomian dan reaksi terhadap perubahan harga. Selain itu, hawala menghambat pengawasan uang dan arus modal dan usaha untuk melawan praktek-praktek keuangan yang illegal.

Hawala merupakan sistem transfer yang dianggap melarikan diri dari prosedur formal pemerintah nasional dan Lembaga internasional karena tidak tercatat di dalam neraca pembayaran negara tersebut sehingga akan menyulitkan lembaga internasional untuk mendata secara akurat neraca pembayaran negara-negara di dunia.

b. Hawala Tujuan Negatif

Hawala dengan tujuan negatif (criminal hawala) merupakan hawala yang tidak dapat dibenarkan dan harus dikriminalisasi. Hawala dengan prinsip seperti ini memiliki tujuan untuk menghindari pajak, menghindari kurs mata uang yang tinggi, perdagangan narkoba, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hawala dengan tujuan negatif khususnya pendanaan terorisme memiliki dampak dibidang ekonomi, sosial, keamanan internasional dan pada keberlangsungan hawala itu sendiri (pure hawala). Dikhawatirkan jika hawala dengan tujuan negatif terus eksis maka akan mempersulit dan menyebabkan akibat yang buruk kepada pure hawala, takutnya akan ada generalisasi bahwa semua hawala digunakan untuk kejahatan padahal tidak semua hawala seperti itu. Oleh karena itu, perlu peraturan yang ketat untuk mencegah adanya praktik hawala dengan tujuan negatif khususnya dalam hal pendanaan terorisme mengingat terorisme sekarang merupakan masalah global yang mengancam dunia semenjak kejadian.

2. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Hawala Disalahgunakan Untuk Pendanaan Terorisme.

Ada beberapa faktor praktik hawala disalahgunakan untuk pendanaan terorisme, yakni sebagai berikut:

- a. Hawala tidak mengisyaratkan adanya identitas yang jelas.
- b. Hawala tidak teregistrasi resmi ke badan pemerintahan.
- c. Sedikitnya koneksi ke bank formal.

Terkait dengan isu pendanaan terorisme, maka beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi dari tipologi pendanaan melalui remitansi dana ini diantaranya adalah:

- a. Besarnya jumlah dana yang dikirimkan melalui sistem remitansi dana.
- b. Nilai rata-rata transaksi remitansi dana tergolong kecil, yakni berkisar 5-8 juta rupiah. Hal ini tentu akan sulit diawasi dan dipantau oleh lembaga pengawas.

- c. Belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang di Indonesia.
- d. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih lanjut mengenai sistem remitansi dana alternatif seperti hawala, sehingga aktivitas pengiriman dana melalui jalur tersebut belum dapat diawasi oleh pemerintah.

3. Bentuk Penyalahgunaan Praktik Hawala Untuk Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pendanaan Terorisme berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. sementara pengertian dana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang.

Dari definisi pendanaan terorisme tersebut di atas harus dipahami dari 2 (dua) sudut vital pendanaan itu sendiri, yakni :

- a. Pendanaan untuk operasional kegiatan terorisme itu sendiri;
- b. Pendanaan penyebaran ideologi dan/atau infrastruktur jaring-jaring kelompok terorisme itu sendiri.

Sementara pendanaan terorisme ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya adalah:

- a. Melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank.
- b. Perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Mereka dapat memperoleh dana dari hasil penjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan.
- c. Melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hawala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan atau melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan

Negara Republik Indonesia. Artinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana/aset itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini, seluruh aparat penegak hukum dan bagian intellijen keuangan atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilarang untuk membocorkan informasi atau data-data terkait dengan dugaan aliran pendanaan terorisme yang mereka temukan. Hakim, jaksa penuntut, pejabat atau pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik dan/atau pihak yang memperoleh dokumen/informasi terkait dilarang untuk membocorkannya pada siapapun. Dikecualikan apabila memang hal tersebut dilakukan atas perintah Undang-undang.

Hal ini berlaku bagi pihak penyedia jasa keuangan yang mengetahui data-data terkait nasabah yang dicurigai, maka mereka dilarang memberitahukan pada siapapun kecuali diperintahkan oleh Undang-undang. Informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang sedang atau telah disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang atas perkara tersebut, atau setidaknya menjadi permulaan diungkapnya suatu perkara pendanaan terorisme.

Perbankan di Indonesia telah memiliki suatu sistem untuk mengenali para nasabah-nasabahnya. Mulai dari sistem know your customer, customer due dilligence, enhanced due dilligence dan berakhir pada pendekatan risk based approach (pendekatan berlandaskan risiko). Prinsip-prinsip mengenal nasabah dilakukan oleh perbankan dalam rangka melindungi sistem keuangan, menjaga agar dana yang berputar dan dikelola oleh perbankan tidak tercampur dana-dana illegal, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa perbankan wajib menjaga prinsip kehati-hatian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), Peraturan Bank Indonesia tersebut berisi mengenai bagaimana perbankan harus mengenali dan mencari tahu profil nasabah, khususnya mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat ke dalam proses transaksi di dalam jasa keuangan. Kemudian di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tahun 2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mengatur bank Indonesia yang menggunakan pendekatan Customer Due Dilligence yang mendalam, yang dikenal sebagai Enhanced Due Dilligence sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Maka kemudian peraturan yang mengatur hal tersebut diharapkan dapat mencegah para pelaku pendanaan terorisme melalui industri jasa keuangan, khususnya perbankan. Langkah-langkah teknis mengenali nasabah sebagai upaya preventif sudah dengan jelas oleh Undang-undang ini jelaskan.

Penegak hukum berhak untuk melakukan terhadap dana-dana yang dicurigai secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Tentu di dalam upaya pemblokiran, harus dimintakan penetapan pengadilan agar rekening dapat diblokir. Bagi mereka yang memiliki dana di bank, dan merasa ada keanehan dengan jumlah dana yang mereka miliki, baik itu bertambah atau berkurang secara mencurigakan dan tidak diketahuinya, maka harus melapor untuk berjaga-jaga bila mungkin dana tersebut dicampur atau digunakan sebagai dana terorisme. Bagi pihak ketiga yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan musti disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-dana tersebut sah dan legal.

Ada dominasi mutlak yang diberikan kepada Kepolisian untuk menentukan siapa yang bisa atau tidak dikatakan sebagai teroris. Hal ini dikuatkan akan menjadi suatu kewenangan yang disalahgunakan oleh kepolisian dimasa datang. Hal yang sangat mungkin kepolisian menjadikan pihak-pihak tertentu sebagai sasaran tuduhan sebagai teroris karena kepentingan-kepentingan di luar hukum. Harus ada pihak lain yang berkompeten untuk dilibatkan dalam pengajuan daftar teroris ini, agar terjadi saling mengamati dan memeriksa validitas informasi dan bukti yang dijadikan alas hukum menuduhkan seseorang atau kelompok sebagai teroris. Musti ada perlindungan hak asasi atas mereka yang mungkin saja menjadi salah sasaran atau informasi tentang kegiatan terorisme.

Status sebagai teroris atau kelompok teroris berlaku selama 6 (enam) bulan (Pasal 31 ayat (1)). Apabila kepolisian menginginkan untuk dilakukannya perpanjangan, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk diperpanjang hingga kasus tersebut terselesaikan. Namun perpanjangan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali, masing-masing 3 (tiga) bulan. (Pasal 31 ayat (2)). Dan apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan karena nama atau kelompoknya masuk sebagai salah satu teroris, maka dapat mengajukan keberatan disertai bukti-bukti sah untuk membuktikannya kepada pengadilan.

Undang-undang ini mengatur tentang pengawasan perpindahan uang atau aset melalui penyedia jasa keuangan atau secara fisik. Pengawasan yang diberikan adalah pengawasan transaksi melalui sistem transfer, pengawasan secara fisik yang dimungkinkan melewati Kepabean Indonesia, dan sistem lainnya. Apabila melalui sistem transfer maka pihak perbankan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk sistem lainnya maka kegiatan tersebut diawasi oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas (LPP). Dan untuk perpindahan dana atau aset secara fisik maka dapat diawasi oleh kepabean Indonesia, karena dikuatkan ada dana atau aset mencurigakan keluar dan masuk wilayah kepabean Indonesia.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 dikenal sistem pemblokiran akun seseorang atau korporasi di dalam sistem penyedia jasa keuangan bank dan non-bank. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berwenang untuk melakukan pemblokiran dengan penetapan

pengadilan Jakarta Pusat untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan memblokir akun keuangan tertentu yang dicurigai merupakan bagian dari pendanaan terorisme. Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemblokiran rekening, maka dapat mengajukan keberatannya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, dan hakim, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diketahuinya ada pemblokiran.

Diketahuinya aset-aset atau dana-dana yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka dibutuhkan upaya khusus untuk melakukan pemblokiran aset atau dana tersebut. Undang-undang ini mensyaratkan adanya hubungan antar negara yang dilakukan untuk mengupayakan adanya pemblokiran aset atau dana dengan mengikuti aturan nasional dan internasional yang berlaku. Agar dapat meyakinkan negara dimana aset atau dana berada, maka harus disertai bukti-bukti kuat, putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pemilik rekening tersebut terkait dengan pendanaan terorisme dan masuk di dalam daftar terorisme yang dikeluarkan secara sah oleh otoritas yang berwenang. Undang-undang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat untuk memberantas terorisme, tanpa adanya rekayasa dan konspirasi dari para pihak yang berkekuasaan penuh atas suatu negara. Tidak diselewengkannya wewenang tertentu akan menjaga proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Diharapkan tidak ada pihak-pihak tidak bersalah yang dijadikan sasaran dari segala tuduhan yang tidak berdasar. Prosedur yang ada sudah sepatutnya dijalankan dengan benar. Dan terkait hubungan dengan yurisdiksi di luar Indonesia, maka upaya Mutual Legal Assistance, upaya diplomasi dan pendekatan agent to agent harus dioptimalkan agar pemblokiran sebagai upaya pencegahan terorisme dapat berjalan.

B. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Atau Mencegah Bentuk Penyalahgunaan Praktik Hawala Untuk Pendanaan Terorisme di Indonesia

Upaya pendekatan secara hard approach yang telah dilakukan oleh Indonesia, adalah:

1. Positifisasi Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi elemen didalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait. Pendekatan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini adalah follow the money dengan maksud agar kegiatan terorisme ini tidak dapat menjalankan rencana-rencananya untuk melakukan teror itu sendiri. Pergeseran pendekatan untuk memberantas tindak pidana terorisme ini dikarenakan telah terjadi banyak fenomena yang ditemukan saat dilakukannya penyelidikan terorisme itu sendiri, salah satunya adalah sumber-sumber dana yang sangat besar datang dari akun rekening yang tidak dikenal atau

dikirimkan oleh pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana utama teroris tersebut. Menurut Bill Tupman, seorang Pakar Kriminologi Australia, menyebutkan bahwa pasca tragedi teror Gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat, telah disita jutaan US Dollars. Maka banyak pakar lain yang juga setuju bahwa pencegahan terorisme dimulai dari bagaimana memutus aliran-aliran dana tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini maka pendanaan terorisme seperti hawala yang dalam praktiknya bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Jadi subyek yang akan dikenakan hukuman bukan hanya pelaku terornya saja tetapi telah diperluas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 ini. Sehingga akibat dari kesepakatan internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme akan memperluas cakupan dari Undang-Undang tentang Money Laundry sehingga potensi ancaman lalu lintas keuangan jaringan terorisme menjadi lebih luas yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama, baik nasional maupun internasional yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

2. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana juga telah mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, Penyelenggara Transfer Dana (PTD) harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Penyelenggara Transfer Dana yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa izin, akan dikenai ancaman hukuman pidana (Penyelenggara Transfer Dana ilegal).

Pada prinsipnya, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan Penyelenggara Transfer Dana karena menyelenggarakan kegiatan transfer dana, sehingga harus memiliki izin (formal). Dalam hal ini upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme khususnya hawala dilakukan melalui:

- a. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan; pelaporan dan pengawasan kepatuhan pengguna jasa keuangan;
- b. pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan

- c. pengawasan pengumpulan dan penerimaan sumbangan.

Disamping itu, Penyedia Jasa Keuangan harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu terkait:

- a. transaksi yang patut diduga menggunakan dana yang terkait atau berhubungan dengan atau akan digunakan untuk tindak pidana terorisme; atau
- b. transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan publikasi pemerintah atau organisasi internasional dikategorikan sebagai teroris atau organisasi teroris.

Sedangkan upaya pendekatan secara soft approach yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam kaitan ini, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan Blueprint Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Mengacu pada dokumen Blueprint, program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan counter-narratives.

SIMPULAN

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa pengiriman uang atau money remittance menjadi rentan ketika tidak semua dana dikirimkan melalui jalur resmi (baik itu via bank maupun non-bank), misalnya apabila dana dikirimkan melalui sistem remitansi alternative (altenative remittance system/ARS) seperti hawala. Sistem hawala tidak menggunakan sistem pencatatan transfer internasional yang menggunakan kode SWIFT seperti pada sistem remitansi resmi, sehingga otomatis pengiriman dana yang menggunakan sistem altenative remittance system menjadi tidak terpantau dan tidak terlacak. Atas hal itulah praktik hawala sebagai salah satu bentuk atau tipologi pendanaan terorisme menjadikan sebagai bentuk tindak pidana pendanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, karena pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah bentuk penyalahgunaan praktik hawala adalah dengan mengkombinasikan secara hard approach dan soft approach. Upaya pendekatan secara hard approach yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik penyalahgunaan hawala dalam pendanaan teroris yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Sedangkan upaya pendekatan secara soft approach yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan program deradikalisasi mencakup rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi

bagi narapidana teroris dengan memberdayakan para tokoh agama serta psikolog untuk memberikan counter-narratives.

SARAN

1. Perlu penanganan yang ekstra baik dari aspek regulasi, kelembagan (institusi) maupun prosedur penanganannya dalam praktik hawala sebagai salah satu bentuk pendanaan terorisme ini, mengingat kegiatan pendanaan terorisme merupakan tulang punggung utama dalam kegiatan terorisme.
2. Diperlukan integrasi secara regulasi baik mengenai tindak pidana terorisme, tindak pidana pendanaan terorisme, dan transfer dana sehingga penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme lebih efektif dan berefek jera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*, Malang: Setara Press, 2012.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Jemadu, Aleksius. *Politik Global Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2008.

Leonides Buencamino and Sergei Gurbanov, *Informal Money Transfer System (IMTS): Opportunitites and Challenges for Development Finance*, New York: United Nations, 2002.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad, Simela Victor. "Ketimpangan Tata Dunia: Analisis Sosio-Ekonomis Terhadap Fenomena Terorisme Internasional", in *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*, ed. by Poltak Partogi Nainggolan, Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Nainggolan, Poltak Partogi. "Terorisme, Human Scurity, Keamanan Internasional Dan Tata Dunia Pasca Perang Dingin", in *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*, ed. by Poltak Partogi

- Nainggolan, Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman, Sufirman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Suat Berharga Pasar Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sarwoko, Djoko. *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siahaan, R.O. *Tindak Pidana Khusus*, Cibubur: Rao Press, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Steve Kiser, *Financing Terror: An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, RAND Corporation: 2005.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Terry Mcdermott, Book Three: The Plot, in *Perfect Soldiers*, New York: Harper Collins, 2005.
- Tim NRA Indonesia, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2015.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: Keni Media, 2015.

Yudhoyono, Susilo Bambang. *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Jakarta: Kementerian Polkam, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

----- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia

Lex Dirgantara

Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

----- . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.